



Jurnal MANAJEMEN PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan

- **Perspektif Desentralisasi Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan Daerah**
Oleh : *Mada Sutapa*
- **Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan**
Oleh : *Muljani A. Nurhadi*
- **Model-Model Perencanaan Strategik**
Oleh : *Tatang M. Amirin*
- **Telaah Konseptual Profesionalisasi Jabatan Kepala Sekolah**
Oleh : *Suyud*
- **Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Rangka Peningkatan Mutu Sekolah**
Oleh : *Meilina Bustari*
- **Pendidikan Nilai dalam Perspektif Humanisme Moderat**
Oleh : *Sudiyono*
- **Menggagas Kebijakan Pendidikan Budi Pekerti Bagi Siswa di Sekolah**
Oleh : *Setya Raharja*
- **Kolaborasi Sekolah – Orangtua: Upaya Meningkatkan Keberfungsian Sosial Orangtua**
Oleh : *Rahmania Utori*

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan
Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI)

DAFTAR ISI

Perspektif Desentralisasi Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan Daerah <i>Oleh : Mada Sutapa</i>	1-11
Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan <i>Oleh : Muljani A. Nurhadi</i>	12-23
Model-Model Perencanaan Strategik <i>Oleh : Tatang M. Amirin</i>	24-36
Telaah Konseptual Profesionalisasi Jabatan Kepala Sekolah <i>Oleh : Suyud</i>	37-46
Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Rangka Peningkatan Mutu Sekolah <i>Oleh : Meilina Bustari</i>	47-54
Pendidikan Nilai dalam Perspektif Humanisme Moderat <i>Oleh : Sudiyono</i>	55-62
Menggagas Kebijakan Pendidikan Budi Pekerti Bagi Siswa di Sekolah <i>Oleh : Setya Raharja</i>	63-70
Kolaborasi Sekolah – Orangtua ; Upaya Meningkatkan Keberfungsian Sosial Orangtua <i>Oleh : Rahmania Utari</i>	71-80

MENGAGAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BAGI SISWA DI SEKOLAH

Setya Raharja*)

Abstract

Splendour behavior forming to the students require to get serious attention to prepare national generation substitution whom taft, attentively to, and durable, for coming period. Ethic Kindness education not solely as instructional activity through subjects at school, but needs more complex process. Time after time, government had been coped to intensify the ethic kindness education to be able to give strong provision in circumstances of life. A sample of ethic kindness education policy in school (formal institution) is etchic kindness contain which integrated in relevant subjects. The ethic kindness aspects should have equal portion in graduating fixation. Therefore, we need synergic collaboration among school, parents, and society to execute the ethic kindness education.

Key words: education, ethic kindness education, educational policy

A. Pendahuluan

Mempersiapkan pribadi bermoral yang mantap pada generasi pengganti (bukan penerus-penulis) untuk masa yang akan datang, sangatlah susah dan perlu kerja keras serta kepedulian yang nyata dari berbagai pihak. Gejala ini secara nyata dapat dilihat pada saat ini, misalnya, guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga, telah bersusah payah berupaya mengajak anak-anak mereka untuk berbuat arif, santun, peduli orang lain, dan beragama. Beberapa perilaku yang telah tertoreh dalam hati anak itu, kadang-kadang mudah sekali hilang manakala anak itu masuk dalam pergaulan di masyarakat atau lingkungan yang lepas kontrol dari orang tua dan sekolah. Kondisi dan pola perilaku masyarakat pada saat ini masih sulit diduga, karena adanya gejolak hati untuk mencari jati diri, yang kadang-kadang emosional dan cenderung negatif.

Upaya kreatif produktif baik oleh orang tua, guru, masyarakat atau pemerintah perlu segera ditemukan dan direalisasikan dengan harapan dapat membantu anak didik menemukan jati dirinya sebagai

* Setya Raharja adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

warganegara yang bermoral, berpotensi dan memiliki tanggung jawab dan andil yang besar dalam pembangunan dan pengembangan bangsa. Sebenarnya upaya-upaya itu telah lama dilakukan, namun dalam pelaksanaannya terjadi distorsi materi sebagai akibat intervensi berlebihan dari pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya lewat pendidikan di sekolah. Hal ini berdampak justru tidak membentuk anak didik yang bermoral. Begitu rezim Orde Baru tumbang, tekanan-tekanan yang ditahan oleh anak-anak selama itu, akhirnya meledak, yang berbuntut pada tindakan yang dapat dikatakan "amoral". Kondisi ini, oleh Nursisto (2000: 6) dikatakan merupakan salah satu indikasi kegagalan sistem pendidikan Indonesia dalam mencetak manusia seutuhnya.

Untuk mengikis perilaku "amoral" dan kemudian mengentalkan perilaku "bermoral" pada anak didik, saat ini pemerintah mencoba dengan memperkuat posisi pendidikan moral bagi anak didik di sekolah, yang tentu saja ini akan berimbang dalam keluarga dan masyarakat. Posisi yang pada saat ini dirasa kuat, pendidikan moral, budi pekerti, maupun akhlak mulia ditempatkan pada porsi yang kedudukannya sejajar dengan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang lain. Di dalam PP 19/2005 tentang SNP ditegaskan bahwa semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama untuk menjadi penentu kelulusan siswa (tamat belajar).

B. Perkembangan Kebijakan Pemerintah

Untuk mengantisipasi keprihatinan bangsa terhadap moral atau budi pekerti para remaja sekolah pada khususnya dan anak didik pada umumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan SK No.64/C/KEP/PP/2000, perubahan dari SK No. 37/C/KEP/PP/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir. Pada pasal 1 ayat 3 dari SK yang terbaru itu, memuat ketentuan bahwa penetapan kelulusan siswa atau tamat belajar dilakukan oleh sekolah penyelenggara melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan nilai rapor, EBTA/Ebtanas, dan budi pekerti siswa yang bersangkutan. (Inspirasi, 2000: 6). Lebih lanjut dikemukakan oleh Nursisto (2000: 6), bahwa ketentuan tersebut setelah menjadi Petunjuk Teknis dituangkan dalam Bab VI pasal 6 poin e, dengan tegas dijelaskan bahwa siswa dinyatakan tamat belajar dengan mempertimbangkan (1) nilai rapor, (2) EBTA, (3) Ebtanas, serta (4) sikap, perilaku, budi pekerti siswa.

Keputusan ini dilaksanakan mulai tahun ajaran 1999/2000, tepatnya pada saat menentukan tamat belajar siswa tahun 2000, keputusan ini sudah diterapkan. Hal ini tentu saja berdampak pada perubahan sistem penyelenggaraan EBTA/Ebtanas di sekolah, sehingga tugas dan tanggung jawab guru dan sekolah semakin kompleks dan harus sangat berhati-hati. Kebijakan ini patut disambut dengan gembira dan bertindak konsekuen turut mendukung-kalau memungkinkan berpartisipasi-

dalam rangka mewujudkan generasi pengganti yang syarat dengan moral pribadi baik dan luhur, cakap, terampil, berwawasan global, kreatif, tanggap, tangguh, dan tanggon.

Dalam perkembangannya pada saat ini, sejak tahun 2005 Pemerintah juga telah memantapkan kembali posisi pendidikan akhlak mulia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa terdapat delapan standar nasional, satu di antaranya adalah standar isi. Di dalam standar isi tersebut diatur tentang kurikulum dan muatan mata pelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada pasal 6, diatur mengenai muatan kurikulum untuk pendidikan umum dan khusus jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu:

1. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. kelompok mata pelajaran estetika;
5. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Dari kelima kelompok mata pelajaran tersebut, jelaslah bahwa pendidikan budi pekerti *mendapatkan tempat yang sejajar dengan kelompok mata pelajaran lainnya. Bahkan, pendidikan budi pekerti secara implisit dapat tergarap lewat tiga kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, serta estetika. Dengan demikian, secara teoritik pendidikan budi pekerti di sekolah akan semakin mantap dan mendapatkan perhatian yang serius.*

C. Pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah

Untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah tersebut, perlu kiranya sekolah segera membenahi dan mengemas pengalaman belajar untuk anak didik sehingga dapat bermakna penuh dalam menanamkan dan membentuk budi pekerti yang luhur. Yang masih menjadi perbincangan serius adalah materi budi pekerti itu berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri atau integrited dalam matapelajaran yang sudah ada.

Menurut pandangan penulis, sebaiknya materi budi pekerti jangan sampai menjadi matapelajaran tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjebaknya sekolah dan guru ke dalam pengembangan domain kognitif saja, sebagaimana matapelajaran PPKn, Pendidikan Agama, dan Kewarganegaraan yang masih berlangsung sampai saat ini. Sebenarnya ketiga matapelajaran tersebut bermuatan pendidikan budi pekerti bagi anak didik, namun karena orientasinya pada

penguasaan materi formal saja, maka apa yang dipelajari, ditangkap, dan dicerna siswa berhenti sampai pada batas-batas kognitif, belum menyentuh aspek afektif yang dalam. Budi pekerti itu merupakan domain afektif (Djemari Mardapi, 2000: 6), yang memiliki karakteristik jauh berbeda dengan domain kognitif tersebut. Budi pekerti akan terbentuk, membekas, atau "terpatri" di hati dan perilaku anak didik hanya jika dapat diterapkan dalam praktek keseharian, baik di rumah maupun di masyarakat (Inspirasi, 2000: 6).

Tinjauan historis, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1945-1962, dalam kurikulum SMP terdapat sembilan kelompok matapelajaran, yang salah satunya adalah Budi Pekerti (Engkoswara dan R. Ibrahim, 1995: 46). Hal ini memberi gambaran bahwa pada saat itu Budi Pekerti merupakan mata pelajaran tersendiri, berdampingan dengan Agama dan matapelajaran lain. Kondisi tersebut berlangsung sampai tahun 1968. Tahun 1968 lahir kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan Orde Baru. Pendidikan budi pekerti tidak berdiri sendiri namun dibebankan pada Pendidikan Moral Pancasila dan IPS, yang mencakup mental, spiritual, dan etika.

Bagaimana untuk pendidikan budi pekerti pada saat sekarang ini? Angin segar yang dihembuskan dari Dirjen Dikdas seharusnya kita dukung sepenuhnya, mengingat kondisi moral para remaja dan anak-anak saat ini sangat memprihatinkan. Ini tantangan berat bagi guru di sekolah. Dalam pelaksanaannya di sekolah guru harus sangat berhati-hati dan cermat dalam mengkategorikan budi pekerti anak dan menetapkannya derajat budi pekerti itu yang nantinya akan menjadi salah satu syarat penentu bagi peserta didik menamatkan belajarnya pada jenjang yang bersangkutan.

Lebih lanjut, di dalam PP No. 19/2005 juga telah dijelaskan bahwa pendidikan budi pekerti dapat melekat atau termasuk di dalam semua kelompok mata pelajaran dengan sebutan yang berbeda-beda. Sebutan atau aspek penekanan yang mungkin dapat bermuatan pendidikan budi pekerti tersebut adalah berkenaan dengan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan/kejujuran. Di samping itu, pendidikan budi pekerti dapat melekat pada muatan lokal yang relevan dengan daerah atau sekolah masing-masing.

Perlu direfleksikan adanya sinyal-sinyal yang menyatakan bahwa guru SD pada saat ini secara umum digambarkan sebagai seorang yang tugasnya menyajikan pelajaran, dalam bentuk menerangkan, mendiktekan pelajaran, dan manugaskan peserta didik untuk mengerjakan tugas, yang selanjutnya akan dinilai hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ukuran yang ditetapkan guru (Soedijarto, 1993: 84). Kondisi semacam ini tidak terlepas dari pendekatan tradisional, yang menyatakan bahwa pengetahuan menjadi kekuatan utama (*knowledge as a power*) yang bersifat fragmentaris, belum/kurang menggunakan pendekatan perspektif terpadu yang mengutamakan pendidikan sebagai suatu kekuatan (*educational as a power*), manusia merupakan kekuatan utama

secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Engkoswara dan R. Ibrahim, 1995: 8). Guru yang bekerja secara profesional akan berpayung pada pendekatan *educational as a power*. Setidaknya, pekerjaan mereka merupakan pekerjaan profesional yang menuntut pekerjaan menyusun rencana belajar mengajar, mengorganisasikan, menata, mengendalikan, membimbing, dan membina terlaksananya proses belajar dan hasil belajar, dan mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan proses belajar bagi dapat disempurnakannya proses belajar mengajar selanjutnya (Soedijarto, 1993: 84).

Pendidikan budi pekerti perlu mempertimbangkan hal-hal yang demikian dengan melihat dan memproyeksikan ke depan pada era dunia global. Metode dan strategi belajar mengajar budi pekerti harus dapat menciptakan setting belajar yang dapat mengintegrasikan antara domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor, dengan penekanan utama pada aspek afektif. Di samping itu harus dapat memadukan antara materi yang dipelajari di sekolah dengan keterterapan di keluarga dan masyarakat. Untuk itu, Djemari Mardapi (2000: 6), menegaskan bahwa strategi mengajar budi pekerti tidak sama dengan mengajar mata pelajaran yang selama ini dilaksanakan, karena materi ajar budi pekerti berupa apa yang baik di masyarakat harus bisa diamati pelaksanaannya di masyarakat.

Ketercapaian tujuan pembelajaran budi pekerti tidak dapat diukur hanya dengan tes, sebagaimana pada mata pelajaran lain yang selama ini dilakukan. Tantangan berat lagi bagi guru. Untuk mengetahui dan menetapkan baik tidaknya budi pekerti anak didik, guru terlebih dulu harus menetapkan komponen-komponen apa yang akan dimasukkan dalam kategori budi pekerti dan bagaimana cara mengukur atau menilainya. Mungkin hal tersebut juga merupakan tantangan bagi para pakar bidang pengukuran dalam hal merumuskan standar minimum budi pekerti yang harus dimiliki oleh siswa (Djemari Mardapi, 2000: 6).

Untuk menetapkan komponen-komponen yang masuk dalam budi pekerti, Rest dan Narvaes, 1994 (dalam Djemari Mardapi, 2000: 6), mengemukakan bahwa ada empat komponen proses yang menentukan pembentukan moral, yaitu kepaakaan moral, justifikasi moral, motivasi moral, dan karakter moral. Secara praktis, dalam pelaksanaan di sekolah saat ini, Nusisto (2000: 6), menjelaskan bahwa sekolah dapat menggariskan ke dalam tiga unsur pokok budi pekerti, yaitu kerajinan, kelakuan, dan kerapian. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dari ketiga komponen itu dimungkinkan nilai B (baik), C (cukup), dan K (kurang). Untuk mencermati lebih jauh bagaimana dapat memperoleh data dan informasi yang akurat tentang budi pekerti anak, hendaknya penilai sudah punya pegangan sampai tataran yang mana budi pekerti itu diinternalisasikan pada anak didik. Apabila menggunakan pendekatan domain afektif, maka tataran-tataran yang ada, dari terdangkal sampai terdalam tertanam di hati dan perilaku anak didik, akan mencakup: *receiving*

atau *attending, responding, valuing, organization, dan characterization by a value or value complex* (Sax, Gilbert, 1980: 71).

Oleh karena budi pekerti merupakan perilaku yang bukan semata-mata sebagai hasil dari mata pelajaran tertentu, maka timbul pertanyaan: "Siapakah yang berhak menilainya? Kapan penilaian itu dilakukan?" Setidaknya wali kelas atau guru kelas serta guru konseling akan punya tugas tambahan untuk pelaksanaan evaluasi budi pekerti siswa. Guru-guru tersebut dianggap cukup tahu soal budi pekerti siswa dan penilaian baik buruknya budi pekerti siswa tentu tidak hanya diukur saat itu (kelas III saja), melainkan selama proses dia menuntut ilmu di sekolah (Kedaulatan Rakyat, 2000: 4). Di samping guru kelas atau wali kelas dan guru bimbingan konseling, perlu melibatkan pula guru matapelajaran, kepala sekolah, bahkan dapat juga melibatkan penjaga sepeda dan kantin sekolah (Nursisto, 2000: 6).

Menurut pandangan penulis, yang menilai budi pekerti anak didik adalah orang yang benar-benar tahu tentang perilaku anak didik tersebut dalam kesehariannya, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, selama proses pendidikan di suatu sekolah. Oleh karena itu, selain penilai yang disebutkan di atas, kiranya perlu adanya informasi tentang budi pekerti anak yang bersumber dari keluarga (orang tua) dan masyarakat di mana anak didik tinggal dan bergaul. Hal ini sesuai dengan pandangan Nursisto (2000: 6) bahwa ukuran budi pekerti harus dilihat di sekolah, di dalam rumah tangga, dan di tengah masyarakat. Informasi dari sekolah dan keluarga dapat diperoleh dengan mudah, namun informasi dari masyarakat perlu kiat tersendiri, diupayakan tidak membebani nara sumber namun diperolehnya informasi yang akurat. Dari ketiga sumber informasi itulah nantinya sekolah dapat menilai budi pekerti anak didik secara komprehensif, mengurangi subjektivitas dan mendekati objektif. Sebagai bukti tertulis, nilai budi pekerti ini akan selalu dituangkan dalam buku rapor, sehingga rapor yang selama ini berisi tentang kemampuan matapelajaran harus diupayakan untuk dilengkapi secara rinci tentang budi pekerti siswa.

D. Dukungan Orang Tua dan Masyarakat

Untuk dapat membentuk budi pekerti yang luhur anak didik secara komprehensif dan kontinu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait erat dengan kehidupan keseharian anak didik tersebut. Pendidikan budi pekerti yang pertama dan utama dilakukan dalam keluarga. Sejak anak itu sudah mulai bergaul dengan teman dan sekolah, maka budi pekerti anak akan terbentuk oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan budi pekerti tidak mutlak menjadi tanggung jawab Depdiknas, namun harus ada kepedulian elemen-elemen lain termasuk lingkungan dan orang tua di rumah (Kedaulatan Rakyat,

2000: 4). Lebih lanjut ditekankan lagi bahwa keberhasilan budi pekerti harus didukung oleh masyarakat agar apa yang diajarkan akan diamalkan dan menjadi karakter seseorang (Djemari Mardapi, 2000: 6).

Di dalam keluarga, akan berlangsung pendidikan etis-religius bagi anak (I.P. Simandjuntak, 1973: 67). Di dalam UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan (Depdikbud, 1995/1996: 6). Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lebih lanjut dijelaskan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Di samping itu, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Untuk di masyarakat, I.P. Simandjuntak (1973: 79), mengemukakan bahwa anak akan memperoleh *pendidikan sosial-etis, terutama dalam pergaulan anak. Jadi jelaslah bahwa budi pekerti luhur dapat terbentuk dan tetap terjaga dengan baik, apabila ada kerja sama yang intensif antara sekolah, keluarga dan masyarakat.*

E. Penutup

Diposisikannya budi pekerti sebagai salah satu bagian dari kelompok mata pelajaran yang sejajar dengan kelompok mata pelajaran lainnya dan memiliki kesamaan porsi sebagai penentu tamat belajar anak didik, perlu disambut dengan gembira yang dibarengi dengan kerja keras para pelaku pendidikan di sekolah. Tugas guru untuk dapat menghasikan tamatan yang benar-benar berkualitas sebagaimana tuntutan masyarakat, tidaklah ringan, dan ini menjadi tantangan yang semakin berat, memerlukan kerja profesional yang lebih proaktif-inovatif dan kreatif-produktif. Dalam pendidikan budi pekerti, "keteladanan" guru sangat diperlukan.

Budi pekerti menjadi tolok ukur kualitas moral pribadi anak didik dimaksudkan untuk memperkuat kualitas kemampuan/kecakapan lain yang dimiliki anak didik, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, penilaian budi pekerti hendaknya dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap seluruh komponen budi pekerti selama anak itu belajar di sekolah tersebut. Pendekatan longitudinal, kiranya dapat membantu guru.

Maksud pemerintah dan kerja keras sekolah memposisikan budi pekerti sebagai unsur penentu tamat belajar tidak hanya sampai batas kognitif, namun sampai dengan nilai dan karakter yang luhur dapat "terpatri" pada anak didik. Untuk itu perlu kolaborasi yang matang antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, teruma dalam setting kehidupan keseharian anak didik.

Daftar Pustaka

- Depdikbud. (1995/1996). *Himpunan Peraturan tentang Pendidikan Sekolah Dasar*, Jakarta: Depdikbud.
- Djemari Mardapi. (2000). "Budi Pekerti sebagai Penentu Tamat Belajar", *Kedaulatan Rakyat*, Th. LV, No. 234. 25 Mei 2000.
- Engkoswara dan R. Ibrahim. (1995). *50 Tahun Pendidikan dan Prospeknya terhadap Pembangunan Bangsa dalam PJP II: Peranan Pendidikan*. Jakarta: ISPI.
- I.P. Simandjuntak. (1973). *Ilmu Pendidikan: Jilid I, II*, Jakarta: Depdikbud.
- Inspirasi: Media Pendidikan Bangsa*,. Nomor 971-Tahun XXXII – Tanggal 1-9 Mei 2000.
- "Kakandepdiknas Wonogiri Desak Budi Pekerti Diajarkan Lagi", *Kedaulatan Rakyat*, Th. LV, No. 210. 30 April 2000. Yogyakarta.
- Nursisto. (2000). "Ebtanas dan Budi Pekerti sebagai Penentu", *Kedaulatan Rakyat*, Th. LV, No. 214. 4 Mei 2000.
- _____. (2000). "Sistem Pendidikan Gagal Cetak Manusia Seutuhnya". *Kedaulatan Rakyat*, Th. LV, No. 210. 30 April 2000.
- PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pelaksanaan Ebtanas Tahun Ini: Budi Pekerti Tolok Ukur Kelulusan", *Kedaulatan Rakyat*, Th. LV, No. 207. 27 April 2000.
- Sax, Gilbert. (1980). *Principles of Education and Psychological Measurement and Evaluation. Second Edition*,. California: Wadsworth, Inc.
- Soedijarto. (1993). *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.